

KATA PENGANTAR

Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan keahlian kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai *supporting system* dapat terselesaikan.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 31 Mei 2018 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Sedangkan atas 87 LKKL, BPK memberikan opini:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN;
2. Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) terhadap 6 LKKL, yaitu pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI;
3. Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap 2 LKKL, yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut.

Ringkasan dan Telaahan terhadap LKPP Tahun 2017 ini memuat hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta lampiran temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan Komisi DPR RI. Selain itu, Ringkasan dan

Telaahan ini juga disajikan dalam bentuk infografis untuk memudahkan BAKN DPR RI dalam memahami temuan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.

Dalam penyusunan Ringkasan dan Telaahan ini Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengundang Auditorat Keuangan BPK RI berdiskusi guna memperdalam temuan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan sebagai bahan BAKN DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2017.

Ringkasan dan Telaahan ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, Juli 2018

DRS. HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	i
Daftar Isi.....	iii
Infografis.....	v
Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat T.A. 2017 Terhadap Sistem Pengendalian Intern.....	1
1 Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
2 Pendapatan.....	3
3 Belanja.....	12
4 Pembiayaan.....	17
5 Aset.....	18
Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat T.A. 2017 pada Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	36
1 Pendapatan.....	37
2 Belanja.....	40
Lampiran.....	49
Lampiran 1.1.1 Rekapitulasi PNBP Terlambat Disetor Tahun 2017 pada K/L.....	50
Lampiran 1.1.2 Rekapitulasi PNBP Belum Disetor Tahun 2017 pad K/L.....	52
Lampiran 1.1.3 Rekapitulasi PNBP kurang pungut Tahun 2017 pada K/L.....	54
Lampiran 1.1.4 Rekapitulasi PNBP Tidak Dipungut Tahun 2017 pada K/L.....	56
Lampiran 1.1.5 Rekapitulasi Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2017.....	58
Lampiran 1.1.6 Rekapitulasi Pungutan PNBP memiliki dasar hukum dan digunakan langsung Tahun 2017 pada K/L.....	60
Lampiran 1.1.7 Kekurangan Pembayaran PNBP.....	61
Lampiran 1.1.8 Potensi Kekurangan dan Kehilangan Penerimaan.....	63

Lampiran 1.1.9 Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan PNBP.....	65
Lampiran 1.1.10 Permasalahan Lainnya yang Terkait dengan Piutang.....	70
Lampiran 2.1.1 Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal pada Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Modal.....	74
Lampiran 2.1.2 Rekapitulasi Permasalahan dalam Kesalahan Penganggaran/Peruntukan Belanja Barang.....	79
Lampiran 2.1.3 Rekapitulasi Permasalahan Belanja Modal atas Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak.....	87
Lampiran 2.1.4 Permasalahan Belanja Barang Lainnya Terkait Kontrak	96
Lampiran 2.1.5 Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai.....	106
Lampiran 2.1.6 Rekapitulasi Permasalahan dalam Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas.....	108
Lampiran 2.1.7 Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Modal Terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	111
Lampiran 2.1.8 Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Barang Terkait dengan Peraturan Perundang-undangan.....	121
Lampiran 2.1.9 Rekapitulasi Permasalahan Lainnya Belanja Pegawai Terkait Peraturan Perundang-undangan.....	139
Lampiran 2.1.10 Rekapitulasi Permasalahan Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos.....	143
Lampiran 2.1.11 Rekapitulasi Permasalahan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang (Selain Perjalanan Dinas dan Kontrak) Tidak Sesuai Ketentuan.....	144

LKPP 2017



Opini

TA	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga				Jumlah Entitas
		WTP	WDP	TMP	TW	
2017	WTP	80	6	2	-	88
2016	WTP	74	8	6	-	88
2015	WDP	56	26	4	-	86

Laporan Realisasi Anggaran

(dalam trilyun rupiah)

Pendapatan Negara

	Penerimaan Perpajakan	PNBP	Penerimaan Hibah
TA 2017	1.343,52	311,21	11,62
TA 2016	1.284,97	261,97	8,98

Belanja Negara

	Belanja Pemerintah Pusat	Transfer ke Daerah				Dana Desa
		Dana Perimbangan	Dana Insentif Daerah	Dana Keistimewaan DIY	Dana Otsus	
TA 2017	1.265,35	654,48	7,50	0,80	19,44	59,76
TA 2016	1.154,01	639,76	5,00	0,54	18,26	46,67

Neraca

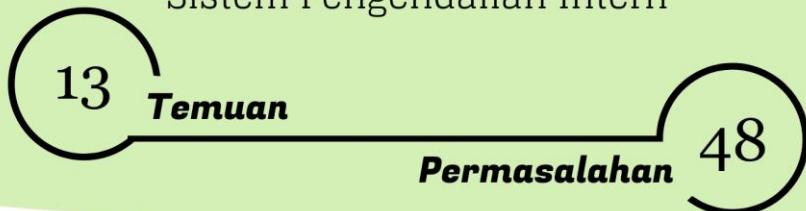
	Aset	Kewajiban	Ekuitas
31 Des 2017	5.947,83	4.407,05	1.540,78
31 Des 2016	5.456,88	3.889,94	1.566,93

TEMUAN LKPP 2017

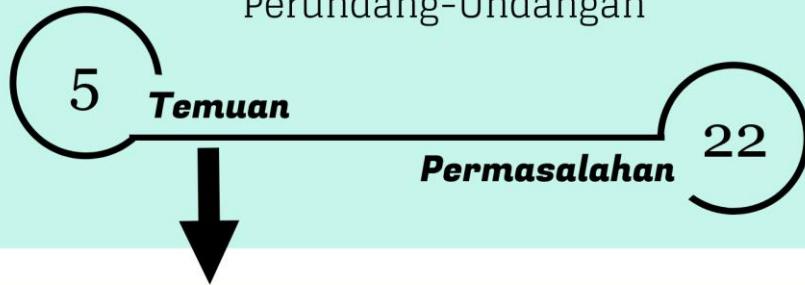


Temuan

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-Undangan



Nilai Temuan



Rp26.538.642.944.095,20

USD13.152.165,19

EUR2.257.530,70

GBP1.986.042,34



LKKL yang Menjadi Perhatian dalam LKPP 2017

LKKL memperoleh Opini WDP dan TMP

- Kementerian Pertahanan (WDP)**
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (TMP)*
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (WDP)
- Badan Pengawas Tenaga Nuklir (WDP)
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (WDP)
- LPP Radio Republik Indonesia (WDP)**
- Badan Keamanan Laut (TMP)*
- LPP Televisi Republik Indonesia (WDP)

*LKKL yang mendapat opini TMP dua tahun berturut-turut (TA 2016 & 2017)

**LKKL yang mendapat opini WDP dua tahun berturut-turut (TA 2016 & 2017)

Permasalahan & Nilai Temuan

(dalam miliar rupiah)

Kementerian Pertahanan	PNBP Piutang Bukan Pajak Belanja Barang	Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Perjadin	10.716,79
Kementerian Kelautan dan Perikanan	PNBP Piutang Bukan Pajak	Belanja Modal	396,98
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Belanja Barang		0,069
Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Belanja Barang		4,23
Kementerian Pemuda dan Olahraga	Belanja Modal Belanja Modal	Belanja Perjadin	761,02
LPP Radio Republik Indonesia	PNBP Piutang Bukan Pajak Belanja Barang	Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Perjadin	25,10
Badan Keamanan Laut	Belanja Modal Belanja Barang	Belanja Pegawai Belanja Perjadin	252,54
LPP Televisi Republik Indonesia	PNBP Piutang Bukan Pajak Belanja Barang	Belanja Modal Belanja Perjadin	37,66